



DISHUB
PACITAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

BUS SEKOLAH

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan
www.dishub.pacitankab.go.id
dishub@pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya pelayanan perhubungan yang prima.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Pacitan, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**



Ir. WASI PRAYITNO, M. Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19630730 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
E. Sistematika	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja	30
B. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV. PENUTUP	48
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	15
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia PNS dan Pegawai Tidak tetap (PTT) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Bidang	9
Tabel 1.3	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum	9
Tabel 1.4	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis	10
Tabel 1.5	Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	11
Tabel 1.6	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Program Kegiatan Tahun	11
Tabel 2.1	Visi dan Misi Bupati Pacitan	24
Tabel 2.2	Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2021-2026	26
Tabel 2.3	Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2022	28
Tabel 2.4	Pencapaian Sasaran berdasarkan anggaran Tahun 2022	29
Tabel 3.1	Standar Pencapaian Kinerja	30
Tabel 3.2	Target Indikator Tujuan Dinas Perhubungan	31
Tabel 3.3	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja	31
Tabel 3.4	Rekapitulasi Capaian IKU Tahun 2021-2026	32
Tabel 3.5	Rekapitulasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	33
Tabel 3.6	Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022	34
Tabel 3.7	Predikat Nilai Capaian Indikator Kinerja	35
Tabel 3.8	Tabel target dan realisasi indikator ke 2	35
Tabel 3.9	Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022	36
Tabel 3.10	Tabel target dan realisasi indikator ke 2	37
Tabel 3.11	Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022	40
Tabel 3.12	Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gambar Struktur Organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Aksi Tahun 2022
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 3 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dan guna efektivitas penyelenggaraan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dirubah menjadi Undang – undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022, serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang ditentukan.

Tujuan dari laporan ini antara lain adalah :

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
3. Sebagai bahan Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pacitan.

D. SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

1. Struktur organisasi

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- (2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- (3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan keselamatan transportasi; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

b. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
2. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi manajemen lalu lintas dan angkutan, serta perparkiran.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi manajemen lalu lintas dan angkutan;
- b) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perparkiran;

- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Seksi Perparkiran; dan

d. Bidang Prasarana Transportasi

Bidang Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi, dan Penerangan Jalan Umum.

Bidang Prasarana Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Penerangan Jalan Umum; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang prasarana transportasi terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi;
2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan

e. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi

Bidang Pengembangan Pengendalian Keselamatan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretaris dinas. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian dan keselamatan transportasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan usaha dan jasa usaha angkutan;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keselamatan transportasi; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi terdiri dari :

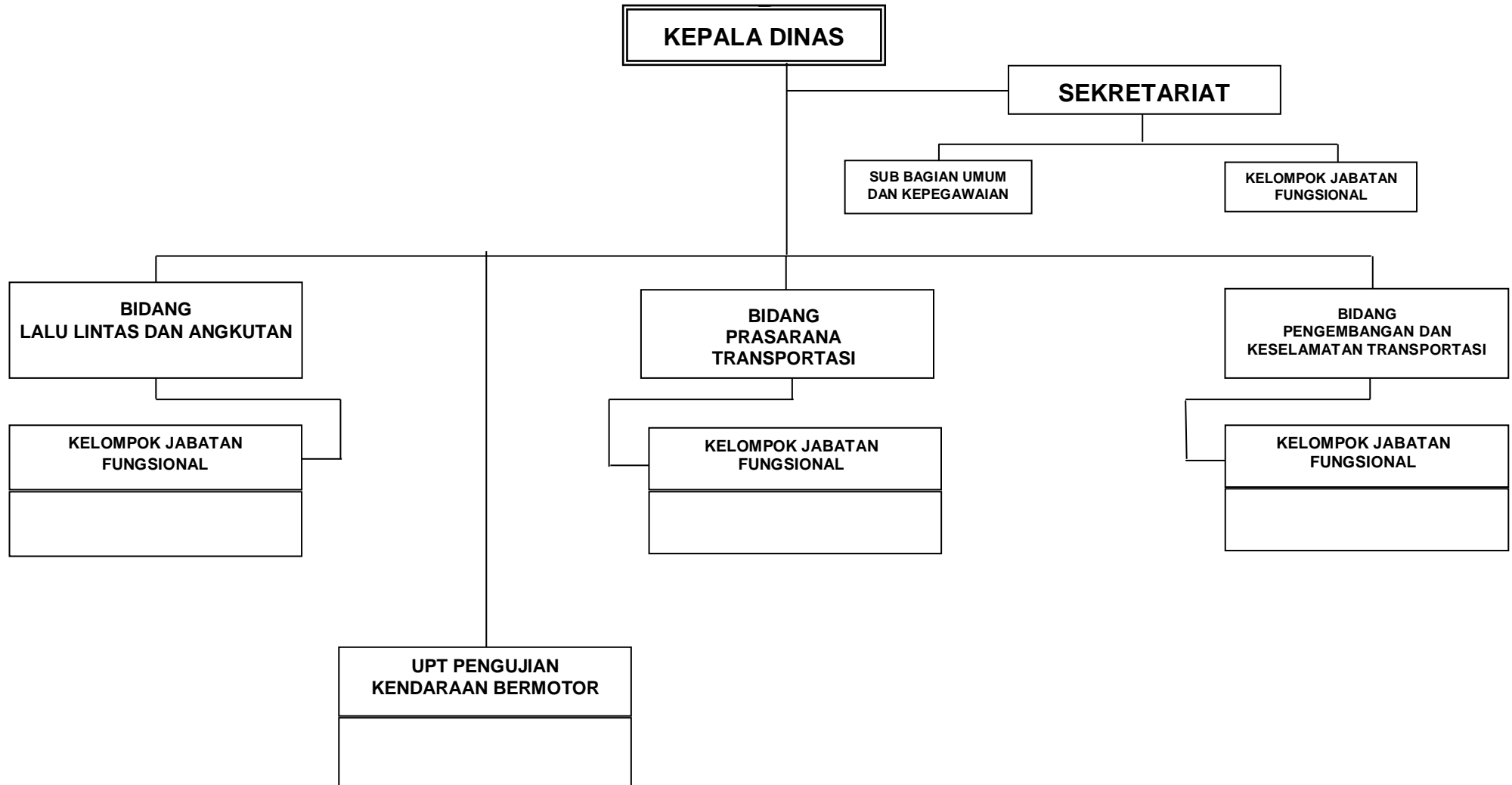
a. Seksi Pengendalian dan Transportasi;

b. Seksi Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi; dan

f. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN



2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan berjumlah 49 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan:

Tabel 1.1
SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Kepala Dinas
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	Sekretaris Dinas
	Pembina	IV/a	2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi
2.	Penata Tingkat I	III/d	8	2 Sekretariat, 2 Bidang lalu lintas dan angkutan, 3 Bidang prasarana transportasi, 1 bidang pengendalian keselamatan dan transportasi, 2 UPT PKB
	Penata	III/c	1	1 Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
	Penata Muda Tingkat I	III/b	6	1 Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, 1 Bidang lalu lintas dan angkutan, 1 Bidang Prasarana Transportasi, 3 UPT PKB

NO	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
	Penata Muda	III/a	3	2 Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, 1 Bidang lalu lintas dan angkutan
3.	Pengatur Tingkat I	II/d	12	3 sekretariat, 3 Bidang Prasarana Transportasi, 2 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, 2 Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, 2 UPT PKB
	Pengatur	II/c	4	2 Sekretariat, 1 Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, 1 Bidang Prasarana Transportasi
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	1 Bidang Prasarana Transportasi
4.	PTT (SK Bupati)		2	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2022

Sebagai fungsi pelayanan masyarakat disektor perhubungan komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan sudah proposional namun akan diupayakan peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia tersebut sesuai dengan prinsip *the right man on the job* dan *the right man on the right place* melalui dukungan untuk meningkatkan jenjang pendidikan umum dan pendidikan teknis yang semuanya sangat penting untuk mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas.

E. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Hal yang belum tentu menjadi masalah pada tahun ini, namun berpotensi menjadi permasalahan daerah pada suatu saat dapat juga dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik yang jika dikelola akan dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Agar dapat memperoleh rumusan isu-isu strategis, diperlukan analisis serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra, Renstra Provinsi dan seterusnya yang sangat diperlukan sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tepat dan dapat terukur kinerjanya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pacitan yang berperan salah satunya untuk mensukseskan Visi dari Kepala Daerah khususnya di bidang perhubungan serta pengambil kebijakan di bidang perhubungan. Kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang handal sehingga dapat meningkatkan pula sektor ekonomi Kabupaten Pacitan.

Dalam perubahan era ekonomi saat ini di Indonesia dari ekonomi yang berbasis industri manufaktur dan teknologi *hard-core*, berubah menjadi ekonomi baru yang berbasis ilmu pengetahuan, *soft-core* dan teknologi informasi. Dengan adanya perubahan tersebut, semua Perangkat Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih sangat cepat dan *real time*. Sejalan dengan hal tersebut, bidang transportasi sebagai motor penggerak perekonomian, telah banyak mengadopsi adanya perkembangan tersebut. Namun karena banyak faktor sehingga dalam mengejar tantangan globalisasi ini akan menjadi tugas dan tantangan yang berat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Sistem transportasi dan jaringan teknologi yang memadai serta berbasis teknologi informasi merupakan satu keterpaduan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat bersaing dengan daerah atau kota terdekat. Perlu upaya maksimal dari seluruh *stake holder* demi mencapai tujuan tersebut, meskipun masih terdapat masalah transportasi yang semakin berkembang di Kabupaten Pacitan pada saat ini. Antara lain :

Permasalahan :

1. Optimalisasi pelayanan

Faktor Internal :

- a. Banyaknya SDM yang belum mengikuti pendidikan dan latihan bidang perhubungan
- b. Jumlah SDM bidang perhubungan kurang

Faktor Eksternal :

- a. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan dari K/L atau Dinas Perhubungan Provinsi
- b. Kurangnya formasi pegawai yang memenuhi kompetensi bidang Perhubungan

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor Internal :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana
- b. Usia sarana dan prasarana yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun
- c. Pelayanan yang belum sistematis berbasis teknologi informasi
- d. Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan

Faktor Eksternal

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat berlalulintas
- b. Semakin meningkatnya Pengguna kendaraan pribadi, sepeda motor dan berkurangnya penggunaan kendaraan angkutan umum
- c. Peraturan yang memberatkan pelaku usaha angkutan umum
- d. Banyaknya kendaraan yang tidak laik jalan
- e. Geografis yang berbukit/pegunungan (84%) sehingga banyak tanjakan dan tikungan

- f. Banyaknya trotoar dan bahu jalan yang dipergunakan untuk kegiatan/usaha masyarakat
- g. Banyaknya fasilitas umum yang belum dilengkapi fasilitas parkir

F. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Menjelaskan secara singkat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sarana dan prasarana serta sistematika penyusunan.

Bab II - Perencanaan Kinerja,

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan periode 2016 – 2021 dan penetapan kinerja untuk Tahun Anggaran 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja ,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun Anggaran 2022.

Bab IV - Penutup,

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Rencana Strategis 2021 – 2026 ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

1. V i s i

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh organisasi atau instansi daerah. Sedangkan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

2. M i s i

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan
Misi 2 : Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melalui
Misi 3 : Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya

Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif,
Misi 4 : Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup”. Pada misi pertama ini Dinas

Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Dinas Perhubungan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi dan Misi Bupati Pacitan

Visi :					
Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA					
Misi ke-1					
Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup					
Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup	Tujuan : Indeks Layanan Lalulintas dan angkutan jalan Sasaran : 1. Prosentasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Optimalisasi Pelayanan 2. Kecelakaan Lalu Lintas	1. Adanya sarana dan prasarana 2. SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan bidang perhubungan 3. Pelayanan yang sudah memenuhi	1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan dari

<p>secara akseleratif dan adil</p>	<p>se Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang</p> <p>2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan</p> <p>3. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan</p>			<p>standar Dilaksanakan Koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan</p>	<p>K/L atau Dinas Perhubungan Provinsi</p> <p>3. Pelayanan yang belum berbasis teknologi informasi</p> <p>4. Kurang optimalnya koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan</p>
------------------------------------	--	--	--	--	---

Tabel 2.2
Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	82.99 %	85.1 %	87.1 %	89.2 %	91.3 %	93.4 %
	2. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0.11 %	0.10 %	0.09 %	0.08 %	0.07 %	0.07 %
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	28.6 %	39.1 %	49.7 %	60.3 %	70.9 %	81.5 %
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimalakuntabile	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	79.20	79.99	80.79	81.60	82.42	83.24

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	daerah						

B. Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya	1. Persentase angkutan	85.1 %

pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	
	2. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0.10 %
	3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	39.1 %
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimalakuntable	1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah	79.99

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dengan telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Program yang telah ditetapkan 2 Program yaitu:

Tabel 2.4
Pencapaian Sasaran berdasarkan anggaran Tahun 2022

Program	Indikator	Anggaran
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		3.948.498.000
	Persentase angkutan laik jalan (lulus uji)	

Program	Indikator	Anggaran
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	
	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	
	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	14.099.472.796
JUMLAH TOTAL		18.047.970.796

Rincian Anggaran perkegiatan disajikan dalam bab III. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan (Renstra 2021-2026)

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Standar Pencapaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
≤ 95	Sangat berhasil
80 - < 95	Berhasil
50 - < 80	Cukup berhasil
0 - < 50	Tidak berhasil

2. Realisasi Indikator Tujuan

Hasil pengukuran indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

NO	Tujuan	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	79,57 %	79,57%	100%

Untuk lebih jelasnya dari pencapaian sasaran tersebut di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Pencapaian Indikator Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan	0,10%	0,10%	100%

		barang			
		% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	85,1%	85,1%	100%
		% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	39,1%	39,1%	100%

Tabel 3.4
Rekapitulasi Capaian IKU Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1.	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang		0,10%		0,10 %
		% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan		85,1%		85,1 %
		% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan		39,1%		39,1 %

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Menguraikan hasil kinerja dengan memuat analisis atas sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.5
Rekapitulasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,10%	0,10%	100%
		% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	85,1%	85,1%	100%
		% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	39,1%	39,1%	100%
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	79,99	80,03	100,05%

Tabel 3.6
Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian (%)	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥95
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	3	0,10%				Sangat berhasil
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	1	79.99				Sangat berhasil
	JUMLAH						

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 100%;
- b. Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%
- c. Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- d. Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 0 sasaran atau 0%

Pencapaian kinerja dari 2 (tiga) sasaran tersebut, dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7
Predikat Nilai Capaian Indikator Kinerja

NO	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	2	4
2	Berhasil		
3	Cukup Berhasil		
4	Kurang Berhasil		
	JUMLAH	2	4

5. Analisa Pengukuran Kinerja

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tujuan 1 :

“Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana prasarana perhubungan”

Hasil evaluasi capaian kinerja Tujuan **“Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana prasarana perhubungan”** dengan 1 (satu) indikator kinerja”, mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 102,38% dengan predikat ***sangat berhasil***.

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan **“Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana prasarana perhubungan”** disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Tabel target dan realisasi indicator ke 2

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	--------	-----------	---------

1	Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan	26.65	26.65	100%
---	---	-------	-------	------

Indikator Kinerja Indeks layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berdasarkan perhitungan dari Indeks kepuasan masyarakat ditambah V/C ratio ditambah presentase tersedianya sarana prasarana perhubungan dibagi tiga

Sasaran 1 :

“Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan” dengan 3 (tiga) indikator kinerja”, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% (seratus persen) dengan predikat **sangat berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan” disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,10%	0,10%	100%
	% angkutan umum yang sesuai dengan	85,10%	85,10%	100%

	standar pelayanan minimal keselamatan			
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	39,15%	39,15%	100%

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan”** melalui 1 program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 3.908.223.981,00 dari anggaran Rp 3.948.498.000,00 atau 98,98%. Realisasi keuangan sebesar 98,98% tersebut, jika dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya data perencanaan yang akurat
2. Dilakukanya pemasangan dan pemeliharaan secara rutin
3. Adanya koordinasi yang baik dengan para stakeholder

Sasaran 2 :

“Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **“Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal”** disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.10
Tabel target dan realisasi indikator ke 2

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	--------	-----------	---------

1	Hasil nilai IKM PD	79.99	80.03	100,05%
---	--------------------	-------	-------	---------

Pencapaian sasaran **“Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal”** melalui 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran **“Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal”** sebesar Rp 13.698.208.532,00 dari anggaran Rp 14.099.472.796,00 atau 97,15%

Analisis Pengukuran Kinerja

Dalam Analisis Pengukuran Kinerja ini, perlu kami uraikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan **“Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana prasarana perhubungan”** yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil, capaian ini berhasil dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2022.
2. Hasil evaluasi capaian kinerja **“Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan”** yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil, capaian ini berhasil dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2022.
3. Hasil evaluasi capaian kinerja **“Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal”** yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian

kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil, capaian ini berhasil dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2022.

Keberhasilan keseluruhan indikator tujuan dan sasaran dalam mencapai target yang ditetapkan merupakan hasil dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dan sinergitas seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Pacitan.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 tentu saja menemui kendala dan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong sebagai penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja organisasi. Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1) Faktor Pendorong keberhasilan pencapaian kinerja:

- Koordinasi yang baik antar unit kerja
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
- Respon yang baik di unit kerja terkait
- Adanya dukungan dana dan SDM
- Pelaksanaan kegiatan tepat waktu

2) Faktor Penghambat pencapaian kinerja:

- Proses tindak lanjut yang membutuhkan waktu lama
- Adanya rasionalisasi anggaran terkait pandemi covid 19
- Masih kurangnya sarana prasarana/alat penunjang kegiatan

3) Rencana Tindak Lanjut/Solusi

- Mengawal proses dari perencanaan, kegiatan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan kegiatan yang mendukung Visi Misi Bupati
- Melaksanakan kegiatan yang menjawab isu-isu strategis bidang Perhubungan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 17.606.432.513,-** dari target belanja sebesar **Rp 18.047.970.796,00** atau **97,55%**. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Realisasi PAD
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Uraian	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.339.139.000,00	3.309.603.000,00	29.536.000,00	99,12
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.840.724.000,00	2.783.661.000,00	57.063.000,00	97.99
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	392.355.000,00	423.540.000,00	(31.185.000,00)	107.95
Retribusi Terminal	65.610.000,00	69.340.000,00	(3.730.000,00)	105.69
Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.200.000,00	32.817.000,00	7.383.000,00	81.63

Uraian	Target PAD	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Retribusi Izin Trayek	250.000,00	250.000,00	5.000,00	98,00

Tabel 3.12
Realisasi PAD
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET	REALISASI	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	: Dana	Rp	45.975.000,-	45.839.723,-
			Output	: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	23
			Outcomes	: Nilai SAKIP PD	Angka	70,55	70,55
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input	: Dana	Rp	3.872.964.946,-	3.766.460.320,-
			Output	: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59	59
			Outcomes	: Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,55	70,55
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input	: Dana	Rp	16.200.000,-	15.984.000,-
			Output	: Persentase pegawai yang	%	100	100

				mendapatkan layanan kepegawaian		
		Outcomes	:	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,55
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input	:	Dana	Rp	554.192.850,-
		Output	:	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100
		Outcomes	:	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,55
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	:	Dana	Rp	9.546.430.000,-
		Output	:	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100
		Outcomes	:	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,55
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	:	Dana	Rp	63.710.000,-
		Output	:	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100

		Outcomes	:	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,55	70,55	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	52.000.000,-	51.673.700,-	
		Output	:	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	
		Outcomes	:	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	%	23	23,8	
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	1.207.660.000,-	12.036.52315,-	
		Output	:	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Titik	760	760	
		Outcomes	:	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	%	58,29	58,32	
3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Input	:	Dana	Rp	393.716.000,-	390.998.700,-	
		Output	:	Jumlah peningkatan	Lokasi	4	4	

				sarana dan prasarana perhubungan			
		Outcomes	:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	%	20	20,04
4	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Input	:	Dana	Rp	850.622.000,-	839.359.005,-
		Output	:	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	orang	1	1
		Outcomes	:	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	angka	23	23,8
5	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input	:	Dana	Rp	339.000.000,-	338.029.400,-
		Output	:	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Unit	9	9

		Outcomes	:	Persentase angkutan laik jalan (lulus uji)	%	39,5	39,54
6	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	857.388.335,-	845.134.300,-
		Output	:	Jumlah manajemen dan rekayasa	Kegiatan	3	3
		Outcomes	:	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	%	58,29	
7	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Input	:	Dana	Rp	214.500.000,-	210.106.750,-
		Output	:	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Kegiatan	130	130
		Outcomes	:	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	%	23	23,8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – Tahun 2022

	8	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	90.000,-	0,-
			Output	:	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	%	100	100
			Outcomes	:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	%	20	20,04
	8	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1	Input	:	Dana	Rp	30.000.000,00,-	28.462.300,-

		(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Output	:	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Kegiatan	2	2
		Outcomes	:	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	%	23	23,8

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 sesuai alokasi anggaran APBD yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pacitan di bidang Perhubungan wajib mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya sesuai dengan TUPOKSI yaitu melalui pemberdayaan semua potensi yang ada guna tercapainya efektifitas dan efisiensi termasuk kualitas dan kuantitas di masing – masing Unit.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, maka hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ada dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memiliki kategori pencapaian tercapai/berhasil dengan rata-rata pencapaian lebih dari 90%. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 97,55%

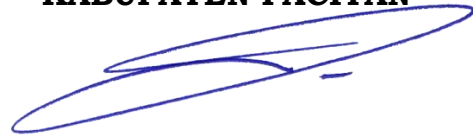
Meskipun tingkat pencapaian kinerja program, kinerja kebijaksanaan dan kinerja kegiatan masuk dalam kategori tercapai atau berhasil, namun demikian masih perlu adanya peningkatan sesuai dengan yang direncanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Dalam menindak lanjuti kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimasa mendatang, hendaknya untuk memenuhi kriteria pencapaian kinerja dan mempermudah proses

perhitungan kinerja, perlu dilakukan analisis mendalam yang lebih sistematis terhadap pencapaian kinerja, serta perlu dilakukan dan didukung terhadap kebijaksanaan, program, kegiatan yang lebih menonjolkan terhadap permasalahan – permasalahan yang lebih prioritas agar terjadi kesesuaian terhadap upaya mendorong kearah pencapaian pelayanan publik yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang menggambarkan Capaian Kinerja setiap indikator kinerja yang merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Tahun Anggaran 2022.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**



Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19630730 198910 1 001